

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Usulkan Sekolah Khusus Siswa Miskin

Dibangun di Lahan PD Pasar Jaya dan Kepulauan Seribu

JAKARTA-DPRD DKI terus mengkritisi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jakarta 2020. Berdasarkan masalah tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mengusulkan dibangunnya sekolah gratis khusus siswa dari keluarga miskin agar tidak ada lagi polemik PPDB.

Usulan itu disampaikan Prasetyo saat rapat Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan DKI. Menurutnya, masalah PPDB bisa diminimalisasi jika Pemprov membangun sekolah khusus masyarakat ekonomi kelas bawah. "Kita kenapa enggak bikin sekolah gratis bagi orang yang nggak mampu. Jadi nggak ada polemik lagi masalah rapor, usia, dan lain-lain," katanya, di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Menurutnya, tidak perlu mencari tanah untuk lahan sekolah baru. Politikus PDIP itu

menilai aset milik Pasar Jaya atau aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah. Terlebih lagi, lokasi milik Pasar Jaya yang tidak terpakai cukup strategis dari pemukiman warga.

Prasetyo juga meminta kepala Dinas Pendidikan agar sekolah gratis juga dibangun di Kepulauan Seribu. Tujuannya, agar warga Kepulauan Seribu tak perlu menyebrang perairan hanya untuk sekolah.

"Kasih tahu ke Pak Gubernur. Pulau Seribu kasih lah, supaya jangan nyeberang, enggak

ke darat, sekolah ada di sana," tegasnya. Selain itu dia juga mendorong Dinas Pendidikan DKI berani untuk menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas peraturan yang dianggap keliru.

"Kalau Permendikbud-nya salah kita lawan, kenapa tidak. Kasih masukan kepada Pak Menteri. Jangan kita kayak kuda dikasih makan suruh lari," terangnya. Jika Dinas Pendidikan menyadari ada kekeliruan yang akan menyebabkan polemik dalam seharusnya Pemerintah Provinsi melakukan langkah diskresi, menyesuaikan kebutuhan pendidikan di ibu kota.

Pras bersikukuh, agar Dinas Pendidikan segera menuntaskan sengkaret PPDB yang diprotes berbagai orang tua calon peserta didik baru. Ia juga berpesan, agar Dinas Pendidikan tidak merasa tertekan hanya karena sistem. "Saya buat diskresi sebagai wakil rakyat yang ada di sini untuk mengeksekusi ini. Kalau ibu enggak bisa ya sudah saya buat gimana caranya," tegasnya.

Masalah Rutin

Sementara itu anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendesak Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti para peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi. Menurut Basri, membiayai para peserta didik di sekolah swasta menjadi tuntutan utama DPRD.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, tidak tertampungnya peserta didik untuk sekolah negeri acap kali menjadi masalah rutin. Ketersediaan sekolah dengan calon peserta didik disebutkan sangat timpang.

"Dari lima tahun lalu tidak pernah ada sekolah baru, SD, SMP mau pun SMA jadi bagaimana mau tertampung? Dari kejadian ini malah wajib Pemda bertanggung jawab terhadap korban PPDB untuk membiayai para siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta," kata Basri.

Ia menganggap Dinas Pendidikan memiliki anggaran cukup untuk mengakomodasi peserta didik yang terpaksa masuk ke sekolah swasta. Andai tidak memiliki anggaran, dia meminta anggaran Formula E diperuntukan sebagai biaya akomodasi. "Banyak dana yang bisa dipakai. Batalkan E Formula," cetusnya.

Nantinya, kewajiban Pemprov untuk membiayai peserta didik di sekolah swasta hingga lulus. Sementara pemilihan sekolah swasta bisa dipilih oleh Pemprov ataupun peserta didik, dengan catatan jarak sekolah tidak jauh dari tempat tinggal. "Ditentukan juga boleh, siswa pilih juga boleh yang penting dekat dengan rumah," tegasnya. (dni)



Kasih masukan kepada Pak Menteri. Jangan kita kayak kuda, dikasih makan suruh lari."

Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta